

DAFTAR PUSTAKA

Azhary, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya

(UI Press 1995).

Khalid Koser, International Migration a very short introduction (Oxford 2007)

Muhaimin Zalhair Achsin, Teori-teori Migrasi Internasional (Malang, Universitas

Brawijaya Press)

Wahyudin Ukun, Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan

Negara di Bidang Keimigrasian, Jakarta: PT. Adi Kencana Aji, September

2004

Muhammad Indra, “Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Hukum Keimigrasian

Indonesia”, Disertasi, Program Doktor Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran,

2008

Yudha Bhakti, Hukum Internasional: Bunga Rampai, Bandung: Alumni, 2003

Amirudin & Zainal Asikin, 2021, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Edisi Revisi),

PT Rajagrafindo Persada,

Awaloedin Djamin, Administrasi Kepolisian RI Menghadapi Tahun 2000, Lembang:

Sanyata Sumasana Wira.

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008

Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta

Asikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta

Hyronimus Rheti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015

John Rawls, A Theory of Justice, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 1971

John Rawls, A Theory of Justice, Revised Edition, OUP, Oxford, 1999

Muhammad Syukri Albani Nasution, Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017

M. Iman Santoso, Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2012

Syahrin, M.A., 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(1), pp.43-57. Syahrin, M.A., 2018. Pro

dan Kontra Penerbitan Perpres No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Bumi Pura

Syahrin, M.A., 2018, September. Penerapan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian. In Seminar Nasional Hukum Universitas

Syahrin, M.A., 2017. Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegaraan (Stateless) yang Ditahan Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta

M. Abdul Kholiq, Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2012

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 2013

Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintahan*, Bandung: Cendikia Press, 2020

Midran Dylan dan Ohan Suryana, *Pengawasan Keimigrasian*, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020

Agung Sampurno, *Keimigrasian Di Wilayah Perbatasan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2007

Moh.Arif, Komentor Undang-Undang Keimigrasian Beserta Peraturan Pemerintah,
Jakarta: N.V. Tjengkir Mas, 1997

Yudha Bhakti, Hukum Internasional: Bunga Rampai, Bandung: Alumni, 2003.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan
Tindakan Keimigrasian.

Muhammad Indra, Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Keimigrasian
Indonesia, Disertasi, Progam Doktor Program Pascasarjana, Bandung:
Universitas Padjadjaran, 2008.

Prayudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1986.

Wahyudin Ukun, Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan
Negara di Bidang Keimigrasian, Jakarta: PT. Adi Kencana Aji, 2004.

Yudha Bhakti, Hukum Internasional: Bunga Rampai, Bandung: Alumni, 2003.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.

